

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut UU No. 44 tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Manajemen Rumah Sakit bukan saja merupakan suatu kegiatan pengelolaan dari pelayanan kesehatan semata. Penyediaan suatu daya dukung yang memadai dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan, sehingga akan dapat diperoleh suatu hasil pelayanan kesehatan yang baik pula. Daya dukung tersebut adalah merupakan suatu asupan (input), yang kemudian diolah dan diproses dengan melaksanakan dan menggerakkan seluruh fungsi-fungsi dari manajemen tersebut, maka akan dihasilkan suatu luaran (output) dalam bentuk jasa pelayanan kesehatan yang memadai dan dapat dipertanggung jawabkan (Febriawati, 2013).

Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian dan administrasi dan pelayanan farmasi klinik melalui pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, *visite*, pemantauan terapi obat (PTO), monitoring efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), dispensing sediaan steril dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD) (Kemenkes, 2016).

Dengan adanya peraturan tersebut maka setiap rumah sakit harus melakukan pengelolaan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dengan mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan, supaya pengelolaan farmasi di RS dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang ada.

Menurut Febriawati (2013), Manajemen logistik suatu bidang manajemen yang tugasnya khusus mengurus logistik obat dan peralatan kesehatan yang ada dalam pelayanan kesehatan. Manajemen logistik merupakan proses yang secara strategik mengatur pengadaan bahan (*procurement*), perpindahan dan penyimpanan bahan, komponen dan penyimpanan barang jadi melalui organisasi dan jaringan pemasaran dengan cara tertentu sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan baik untuk jangka waktu sekarang maupun waktu yang akan datang melalui pemenuhan pesanan dengan biaya yang efektif.

Bahan medis habis pakai (BMHP) adalah alat kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai (*single use*) yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan BMHP harus menjamin ketersediaan, keamanan, bermutu, bermanfaat dan terjangkau. Pengelolaan BMHP harus dilaksanakan secara multidisiplin, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya (Kemenkes, 2016).

Menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa pengelolaan BMHP di RS harus dilakukan oleh Instalansi Farmasi dengan sistem satu pintu. Sistem satu pintu yang dimaksud adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan dan pendistribusian, dengan demikian BMHP yang beredar di RS merupakan tanggung jawab Instalansi Farmasi, sehingga tidak ada pengelolaan sediaan BMHP yang dilaksanakan selain oleh Instalansi Farmasi.

Dalam Permenkes No. 43 Tahun 2013 tentang cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik, Laboratorium klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Manajemen laboratorium harus dilakukan secara baik agar laboratorium terhindar dari masalah kehabisan persediaan BMHP di gudang farmasi. Apabila

terjadi kekosongan BMHP di gudang farmasi, akan sangat berpengaruh terhadap mutu pelayanan laboratorium yang diberikan kepada pasien. Hal inilah yang seringkali terjadi di sub bagian gudang farmasi sehingga BMHP tersebut harus melakukan pemesanan kembali kepada distributor melalui *e-catalog* sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dengan ini, penulis akan mengajukan proposal magang dengan judul **“Gambaran Pengelolaan Logistik Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Unit Laboratorium RSUD Matraman Tahun 2018”**.

1.2 Tujuan

1.2.1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran pengelolaan logistik bahan medis habis pakai (BMHP) di unit laboratorium RSUD Matraman, Jakarta Timur tahun 2018.

1.2.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran umum RSUD Matraman tentang pengelolaan logistik bahan medis habis pakai (BMHP) tahun 2018.
2. Mengetahui gambaran umum unit laboratorium tentang pengelolaan logistik bahan medis habis pakai (BMHP) tahun 2018.
3. Mengetahui gambaran input meliputi SDM, Sarana Prasarana, Metode dan Anggaran dalam pengelolaan bahan medis habis pakai (BMHP) di unit laboratorium RSUD Matraman, Jakarta Timur tahun 2018.
4. Mengetahui gambaran proses meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pemusnahan dalam pengelolaan bahan medis habis pakai (BMHP) di unit laboratorium RSUD Matraman, Jakarta Timur tahun 2018.
5. Mengetahui gambaran output dalam terpenuhinya logistik bahan medis habis pakai (BMHP) di unit laboratorium RSUD Matraman, Jakarta Timur tahun 2018.

1.3 Manfaat

1.3.1. Bagi Mahasiswa

1. Dapat menerapkan keilmuan tentang gambaran pengelolaan logistik bahan medis habis pakai (BMHP) unit laboratorium di RSUD Matraman, Jakarta Timur.
2. Menambah pengetahuan di bidang pengelolaan logistik bahan medis habis pakai (BMHP) unit laboratorium di RSUD Matraman, Jakarta Timur.
3. Memperoleh pengalaman di bidang pengelolaan logistik bahan medis habis pakai (BMHP) unit laboratorium di RSUD Matraman, Jakarta Timur.

1.3.2. Bagi Fakultas

1. Terbinanya kerja sama yang baik antara institusi perguruan tinggi dengan rumah sakit terkait dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi akademik serta dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan melibatkan tenaga terampil dan tenaga lapangan dalam kegiatan magang.
3. Memperoleh masukan yang positif untuk dapat ditetapkan dalam program magang selanjutnya

1.3.3. Bagi Rumah Sakit

1. Terjalannya kerja sama dengan pihak institusi pendidikan dalam kaitannya meningkatkan sumber daya manusia.
2. Laporan magang dapat menjadi referensi dan masukan terhadap kebijakan Rumah Sakit mengenai manajemen logistik.